

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

## Tidak Ada Sejarah JPO Berbayar

### Pembangunan menggunakan anggaran DKI Jakarta maka JPO di mana pun tidak boleh dikenai biaya.

JAKARTA – Pengamat transportasi dan tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mempertanyakan jembatan penyeberangan orang (JPO) harus membayar. "Dasarnya apa mesti bayar," kata Yayat, di Jakarta, Selasa (7/2).

Menurutnya, JPO atau *skywalk* itu untuk memudahkan orang berpindah atau integrasi. Jangan mengada-ngada. Kalau berbayar, harus jelas peraturannya. Kalau berbayar itu masuk retribusi, pajak atau sewa penggunaan. Itu tidak jelas. "Berbayar menurut siapa itu," tanya Yayat.

Dia menuturkan, apabila

JPO dipungut biaya, harus jelas aturan penerapannya supaya tidak memberatkan masyarakat. Jadi harus jelas aturannya. Apakah masuk kategori pajak, retribusi, pemanfaatan, atau fasilitas. "Tidak ada sejarahnya JPO berbayar. Jadi, pemerintah DKI harus jelas dalam menerapkan aturan," pinta Yayat.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menambahkan JPB bayar sangat memberatkan. Menurutnya, JPO merupakan fasilitas umum sehingga kewajiban negara untuk menyediakannya. "Justru ini memberatkan masyarakat. Selama ini masyarakat membayar pajak sebagai kewajiban. Kemudian, pemerintah memiliki kewajiban membuat fasilitas umum dari pajak yang dibayar warga," ujar Trubus.

Menurut Trubus, apabila pemerintah menerapkan tarif JPO, bisa diduga ada praktik pungutan liar karena bertentangan Undang-Undang Dasar 1945.

"Jadi, kalau ditarif itu namanya pungli. Itu memeras masyarakat. Dalam UUD 1945 disebutkan, negara dilarang berbisnis dengan rakyatnya. Artinya, tidak boleh fasilitas umum dikenakan tarif," jelas Trubus.

Selain itu, kata Trubus, rencana pemerintah Provinsi DKI

terlalu urgen," ucap Trubus.

Ditemui di kawasan Se-manggi, salah seorang warga asal Pamulang, Ronald (34), keberatan peneanaan tarif kepada masyarakat yang melintasi JPO Kebayoran Lama. "Saya tidak setuju," ujar Ronald. Dia menambahkan, sebaiknya digratiskan karena itu fasilitas umum.

Sedangkan Kepala Dinas Bina Marga DKI, Hari Nugroho, akan membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dekat *skywalk* Kebayoran Lama. Sebab fasilitas yang baru diresmikan itu bukan untuk penyeberangan umum.

Menurut Hari, rencananya JPO dibangun di dekat Halte Transjakarta Pasar Kebayoran Lama Koridor Delapan yang berjarak sekitar 180 meter dari *skywalk* Kebayoran Lama. Akan tetapi, ia belum memberikan rincian waktu pembangunan JPO termasuk alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas tambahan itu.

Menurut Hari, JPO itu nantinya diperuntukkan bagi masyarakat yang melintas, tidak untuk menumpang angkutan umum. Selain itu, JPO sepanjang 450 meter itu tidak seperti JPO Phinisi yang gratis atau masyarakat bebas melintasinya.

JPO ini bagi pengguna jasa angkutan umum untuk memudahkan mobilitas pengguna moda transportasi Transjakarta dan Stasiun KAI Kebayoran Lama. "Para penumpang dari tiga moda transportasi, dulu harus jalan kaki di bawah yang padat dan ramai, sekarang sudah nyaman," katanya. Pelintas harus membayar 3.500 dengan tap uang elektronik.

Setelah diprotes, kemarin malam, diinformasikan bahwa JPO tersebut akhirnya digratiskan. "Iya betul, dipastikan seterusnya masyarakat umum bisa melewati Skywalk Kebayoran Lama tanpa harus membayar," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta Anang Rizkani Noor. ■ **jon/G-1**

« Tidak ada sejarahnya JPO berbayar. Jadi, pemerintah DKI harus jelas dalam menerapkan aturan. »

**YAYAT SUPRIATNA**  
Pengamat transportasi dan tata kota Universitas Trisakti

Jakarta membangun JPO dekat *skywalk* Kebayoran Lama dinilai tidak ada efisien karena orang jarang melintas kawasan tersebut. "Ini kesannya buang-buang anggaran karena tidak